

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abidin, Said Zaenal, *Kebijakan Publik*, Yayasan Pancur Siwah, Jakarta, 2004.
- Anggara, Sahya, *Kebijakan Publik*, Pustaka Setia, Bandung, 2014.
- A. Chalik Ali, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara dan Proses Pembentukannya*, Grafindo, Bandung, 1983.
- Anggoro, Kusnanto, *Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, Keetertiban Umum*, Departemen Kehakiman RI, Denpasar, 2003.
- Asshiddiqie, Jimliy, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Fauzan, Encik M, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2016.
- Fendri, Azmi, *Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Dan Batu Bara*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2016.
- Gadjong, Agussalim Andi, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.
- Hanitijo S, Ronny, *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.
- , *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2009.
- , *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2007.
- Indiahono, Dwiyanto, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, Gava Media, Yogyakarta, 2009.
- Juniarso, Ridwan, dan Sudrajat Achmad Sodik, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*, Nuansa, Bandung, 2009.
- Kusumanegara, Solahudin, *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*, Gava Media, Yogyakarta, 2010.

- Kusnardi, Moh, dan Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara, Gaya Media Pratama*, Jakarta, 1995.
- Lomgdong, Tineke Louise Tuegeh, *Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1958.
- Lubis, M. Solly, *Kebijakan Publik*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Manan, Bagir, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Marzuki, M. Laica, *Berjalan-Jalan di Ranah Hukum*, Buku Kesatu, Edisi Revisi Cetakan Kedua, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Nurcholis, Hanif, *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonom Daerah*, Grasindo, Jakarta, 2005.
- Raharjo, Satjipto, *Membedah Progesif Hukum*, Grafika Mardi Yuana, Bogor, 2006.
- Sudargo, Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Alumni, Bandung, 1989.
- Suyanto, *Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Cetakan Pertama, Gresik Press, Gresik, 2022.
- Usman, Sunyoto, *Modal Sosial*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2018.

Tesis-Tesis

- Gumelar, Nanda Ridzki, *Peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Dalam Perlindungan Masyarakat Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Di Kabupaten Sleman*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

Jurnal Hukum

- Azhari, Faisol, *Polri: Dalam Fungsi Penegakkan Ketertiban dan Dasar Kehidupan Masyarakat*, *Jurnal Hukum*, Edisi 2 Vol 26, 2011.
- Gunawan, *Peran Satuan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Cilacap*, *Jurnal Bina Praja*, Edisi No. 4 Vol. 7, Litbang Kemendagri, 2015.
- Hamudy, Moh. Ilham, *Eksistensi Satuan Perlindungan Masyarakat*. *Jurnal Bina Praja*, Edisi No. 4 Vol. 6. Litbang Kemendagri, 2014.

Rohman, Azhim, DKK, *Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat (satlinmas) Dalam Penanggulangan Bencana*, Jurnal Respon Publik, Vol. 13, No. 6, 2019.

Susetyo, Heru, *Menuju Paradigma Keamanan Komprehensif Berperspektif Keamanan Manusia Dalam Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia*, Lex Journalica, edisi 1 Vol. 6, Universitas Indonesia, 2008.

Syafier, Elza, DKK, *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah*, Journal Of Judicial Review, Vol. XVI, No.1, Juni 2014.

Media Daring

Republika.co.id, *HUT Satpol PP dan Satlinmas, Momentum Perbaikan Kualitas*, diunggah pada tanggal 4 Maret 2021, melalui, <https://www.republika.co.id/berita/qpf7ks430/hut-satpol-pp-dan-satlinmas-momentum-perbaikan-kualitas>, diakses pada tanggal 3 Januari 2022.

Pamungkas, Destriana Indra, *Apa Fungsi Perlindungan Masyarakat, Simak Penjelasanannya*, diunggah pada tanggal 18 Maret 2022, melalui: <https://edukasi.okezone.com/read/2022/03/18/623/2563901/apa-fungsi-perlindungan-masyarakat-simak-penjelasanannya?page=2>, diakses pada tanggal 7 Juni 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Permendagri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satlinmas Dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban, Dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat.